



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **A. HAMID SALEH**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **72075**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.125.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/81 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 16170 m2 di ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 7567 m2 di ACEH BESAR, WARISAN Rp. 35.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 417 m2/150 m2 di BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 735 m2 di BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
6. Tanah Seluas 936 m2 di PIDIE, WARISAN Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 2000 m2 di PIDIE, WARISAN Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 934 m2 di BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
9. Tanah Seluas 1146 m2 di BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
10. Tanah Seluas 782 m2 di BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 62.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 157.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	42.475.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	127.330.096
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.451.805.096
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	105.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.346.805.096

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Juli 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.